

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Ada pun faktor penyebab timbulnya ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia yakni :
 - a. Dilihat dari latar belakang munculnya UU PMA Nomor 1 Tahun 1967, undang-undang ini khusus diberlakukan kepada investor asing. Untuk investor dalam negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini berarti ada perbedaan perlakuan antara investor asing dengan investor dalam negeri. Dalam tatanan hukum investasi internasional (*International Investment law*) sendiri sudah mulai dihilangkan perbedaan perlakuan antara pelaku usaha asing dan lokal.
 - b. Secara substansial pengaturan tentang investasi asing sebagaimana yang dijabarkan dalam UU PMA Nomor 1 Tahun 1967 cukup singkat, sehingga dalam pelaksanaan undang-undang ini perlu penjabaran lebih dalam berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu pelaksanaan undang-undang ini juga terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang erat hubungannya dengan investasi asing. Hal ini tentu dapat menimbulkan berbagai

interpretasi dari berbagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan investasi. Akibatnya adalah bagi investor tidak ada suatu jaminan hukum yang pasti yang dapat dijadikan pegangan dalam menjakan investasi.

- c. Lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan dalam mengelola investasi, belum ada ketegasan apakah kewenangan mengelolala investasi hanya satu instansi atau di berbagai instansi yang dikoordinasikan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
- d. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

2. Kehadiran investor asing untuk masa kini tidak lagi dianggap hanya sebagai pelengkap dalam membangun perekonomian nasional, akan tetapi kehadiran investor asing sudah menjadi penggerak roda pembangunan ekonomi nasional. Investor asing akan berinvestasi jika ia melihat ketentuan investasi yang ada akan melindungi investasinya. Perlindungan investasi ini akan dilihat sesuai kualifikasi tuntutan global yakni terciptanya tata kelola investasi yang baik (*Good Investment Governance, GIG*). Tata kelola investasi yang baik mempunyai konsekuensi, diterbitkannya serangkaian ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang investasi perlu ada keterlibatan dari berbagai pihak yang terkait dengan tata kelola investasi yang baik. Hal ini penting agar dalam

pelaksanaan peraturan yang diterbitkan tersebut, tidak terjadi berbagai benturan kepentingan. Selain itu, kemungkinan timbulnya tumpang tindih berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal dapat diminalisasi sejak awal.

3. Dalam membangun sistem hukum investasi nasional perlu pendekatan yang lebih komprehensif. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan hukum investasi nasional yang akan dibangun dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkait dengan investasi. Salah pihak yang cukup terkait dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Untuk itu, dalam merumuskan ketentuan hukum investasi nasional perlu keikutsertaan pemerintah daerah. Agar ketentuan hukum investasi nasional yang akan dibangun kompetitif dengan era globalisasi perlu memperhatikan, norma-norma hukum investasi yang di negara lain.

B. SARAN

1. Upaya untuk mengurangi terjadinya ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia yakni menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang investasi dengan berbagai perjanjian internasional baik yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan investasi yang dikuti oleh pemerintah Indonesia. Penyesuain dengan

berbagai perjanjian internasional tersebut dapat dilakukan dengan cara Pertama, mengamandemen perundang-undangan di bidang investasi. Kedua, menerbitkan undang-undang investasi yang baru. Dalam pembaruan undang-undang investasi tidak perlu dibedakan lagi pengaturan untuk investasi asing dengan investasi dalam negeri. Terbitnya undang-undang yang baru diharapkan, tidak ada lagi keragu-raguan bagi calon investor khususnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, sebab secara normatif tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara pemodal asing dengan pemodal lokal (dalam negeri).

2. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi adalah masalah jangka waktu pengurusan perijinan investasi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, ternyata jangka waktu pengurusan perijinan investasi di Indonesia memakan waktu yang cukup lama. Agar persaingan dalam merebut calon investor dapat berkompetisi dengan negara lain, maka rantai birokrasi yang dirasakan cukup panjang perlu diperpendek. Untuk perlunya ditetapkan jangka waktu pengurusan perijinan. Hal ini penting agar para investor dapat mengetahui berapa lama dia harus menunggu keluarnya ijin investasi, sebab bagi para investor perlu menghitung biaya yang harus dia keluarkan dalam pengurusan ijin yang dimaksud. Atau bisa juga ditentukan jika keputusan belum diterbitkan dalam jangka waktu yang

ditentukan, maka investor tersebut dapat menjalankan usaha atau berinvestasi tanpa harus ada ijin.

3. Fungsi badan yang mengelola penanaman modal perlu pertegas, apakah fungsi badan ini hanya sebagai badan yang mengkoordinasikan berbagai instansi yang terkait ataukah juga badan ini memberi keputusan boleh tidaknya suatu investasi dilakukan oleh investor. Hal ini penting, agar calon investor mengetahui sejak awal ia mengurus perijinan investasi seluruh persyaratan yang dibutuhkan berada dalam satu insitusi yang mempunyai otiritas untuk itu.
4. Perlu disinkronisasikan berbagai peraturan yang terkait dengan investasi. Hal ini penting, mengingat berbagai peraturan yang ada yang terkait dengan investasi cukup banyak, sehingga bagi investor sendiri mengalami hambatan dalam memahami ketentuan investasi yang ada.
5. Perlu dipertegas bagaimana peran dan posisi pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola investasi. Hal ini penting, mengingat lokasi beroperasinya perusahaan penanam modal ada di daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya kejelasan tersebut kemungkinan adanya perbedaan interprestasi dalam pengelolaan investasi dapat diminimalisasi sejak awal.

6. Dengan diakuinya Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan nasional, maka sebaiknya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerbitkan Perda, perlu mensikronisasikan dengan berbagai peraturan lain yang ada kaitannya dengan investasi agar tidak saling bertentangan. Selain itu Perda yang akan diterbitkan tersebut sebaiknya dapat dijadikan sebagai pemacu hadirnya investor ke daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Abdurrachman.** *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan.* Cetakan Keenam. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Abdulkadir Muhammad.** *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah Sani.** *Hakim dan Keadilan Hukum.* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Achmad Ali.** *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis).* Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Achmad Ichsan dan R. Sorojo.** *Dasar-Dasar Tata Hukum Indonesia.* Bandung : Sumur Bandung, 1960.
- Ade Maman Suherman.** *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global.*__Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- A.F. Elly Erawaty.** *Meningkatkan Investasi Asing Di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari “The Mutlilateral Investment Guarantee Agency”.* Bandung : Pusat Studi Hukum Unpar, 1989.
- A.F. Elly Erawaty dan J.S Badudu.** *Kamus Hukum Ekonomi (Inggris Indonesia).* Edisi Pendahuluan. Jakarta : Elips, 1995.
- Agus Priyanto (ed).** *Analisis Hukum 2002. Jangan Tunggu Langit Runtuh.* Jakarta : Jakarta Siar Publika (Hukum Online), 2002.

- Ahmad M. Ramli.** *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro kerjasama dengan Mochtar, Karuwin & Komar.** *Reformasi Hukum Di Indonesia.* Cetakan Keempat. Jakarta: Mei 2004
- Aminuddin Ilmar.** *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amrah Muslimin.** *Beberapa Asas-Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi.* Bandung: Alumni, 1985.
- Amrah Muslimin.** *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah.* Bandung: Alumni, 1978.
- A. Napitupulu.** *Joint Ventures Di Indonesia.* Jakarta : Erlangga, 1975
- Andreae, Fockema.** *Fockema Andreae's Rechtsgeleard Handwoordenboek. (Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesa)* Penerjemah: **Saleh Adiwinata (dkk).** Bandung: Binacipta, 1983.
- Andre Ata Ujan.** *Keadilan Dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls.* Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- A. Posner, Richard.** *Overcoming Law.* Harvard University Press, 1995.
- Apul D. Maharadja.** *Membangun Indonesia. Studi Kasus Batam.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Arbi Sanit.** *Sistem Politik Indonesia. Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan.* Jakarta: Rajawali, 1981.

- Arief Budiman.** *Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia, 2002.
- A.R. Soehoed.** *Asahan Peluang Yang Bisa Terbuang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Artidjo Alkostar (ed).** *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: FH UII, 1997.
- Ashcroft, John. D and Janet E. Ashcroft.** *College Law for Business. Ninth Edition*. Ohio: South-Western Publishing Co, 1981.
- Asian Productivity Organization.** *Intra-National Transfer of Technology (Alih Teknologi Intra Nasional)*. Alih Bahasa, **J. Ravianto**. Jakarta: 1987.
- Azhary.** *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- A. Sony Keraf.** *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah. Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Azhary.** *Ilmu Negara. Pembahasan buku Prof.Mr.R. Kranenburg*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983.
- Azhary.** *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Nomatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Bachrawi Sanusi.** *Sistem Ekonomi Suatu Pengantar*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2000.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Peta Investasi Indonesia.* Jakarta :
1992.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Informasi Investasi di Indonesia.*
Jakarta, 1994.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Investmen in Indonesia.* Jakarta:
1994.

**Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman
RI.** *Simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa
transisi.* Bandung: Binacipta, 1979.

**Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman
RI.** *Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam
Rangka Pengolahan Bahan Rencana Ilmiah Bidang
Penanaman Modal.* Jakarta, 1979.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI
. *Simposium hubungan timbal balik antara hukum dan
kenyataan-kenyataan masyarakat.* Bandung: Binacipta,
1979.

**Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kahakiman
RI.** *Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam
Rangka Pengolahan Bahan Rencana Ilmiah Bidang
Penanaman Modal.* Jakarta, Juli 1979.

**Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kahakiman
RI.** *Simposium Aspek-aspek Hukum Perusahaan
Multinasional.* Bandung: Binacipta, 1982.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman

RI. *Laporan Akhir: Penelitian Tentang Aspek Hukum Perdagangan Dikaitkan Dengan Penanaman Modal Asing.*
Jakarta, tahun anggaran 1995/1996

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman

RI. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perubahan/Penyempurnaan Undang-undang Penanaman Modal.* Jakarta, 1996.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman

Dan HAM RI. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Buku 3.* Bali, 14-18 Juli 2003.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman

Dan HAM RI. *Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Budaya Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional.*
Jakarta, Juli 2003.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman

Dan HAM RI. *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penanaman Modal.* Jakarta, Juli 2003.

Badger, Ralph E (et.al). *Investment Principles and Practices. 5th editions*

NY: Printice Hall, 1961.

Bambang Sugeng. *How AFTA Are You?* Jakarta: Gramedia, 2003.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali,

1997.

- Bambang Yodoyono.** *Otonomi Daerah. Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD.* Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Bantarto Bandoro dan Ananta Gondomono** (Penyunting). *ASEAN Dan Tantangan Satu Asia Tenggara.* Jakarta: CSIS, 1997.
- Barnet, Richard. J and Ronald E.Muller.** *Menjangkau Dunia Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional.* Jakarta: LP3ES, 1984.
- Bartlett, Anderson G. (et.al).** *PERTAMINA Indonesian Oil (PERTAMINA, Perusahaan Minyak Nasional).* Alih Bahasa, **Mara Karma.** Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- Bau, Warren C and Stokes M.Tolbert.** Penerjemah :**Bassilius Bengo Teku.** *Investasi Dalam Pembangunan. Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia.* Jakarta : UI Press, 1988.
- Bello, Walden.** *Deglobalization Ideas for a New World Economy (Deglobalisasi).* Alih bahasa oleh Tim Pondok Edukasi. Yogyakarta, 2004.
- Bedjaoui, Mohammed.** *Towards A New International Economic Order (Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru).*Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Bernard Arief Sidharta.** *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.* Bandung: Mandar Maju, 1999.

- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja A.R.** *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung, 1994..
- Bintoro Tjokroamidjojo.** *Manajemen Pembangunan*. Cetakan Keempat Jakarta: Hajimasagung, 1991.
- Bismar Nasution.** *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, Program Pascasarjana, 2001.
- Black, Henry Campbell.** *Black's Law Dictionary, 6th edition*.. St..Paul, Minn. West Publishing, Co. 1990.
- Bob Sugeng Hadiwinata.** *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta : Kanisius, 2002.
- Bob Sugeng Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan.** *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bob Widyahartono.** *Bisnis Dan Manajemen Jepang*. Jakarta: Intermedia, 1985.
- Boer Mauna.** *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.
- Bruggink, J.J. H.** *Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie (Refleksi Tentang Hukum)*. Cetakan Kedua. Alih Bahasa oleh **B. Arief Sidharta**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bruno, Michael and Baris Pleskovic (ed).** *Annual World Bank Conference on Development Economics 1996*. Washington DC, 1996.
- Bryant, Coralie and Louise G. White.** *Managing Development in the Third World (Manajemen Pembangunan Untuk Negara*

Berkembang). Cetakan Kedua. Penerjemah : **Rusyanto L. Simatupang**. Jakarta : LP3ES, 1989.

Buckley, Peter.J and Mark Casson. *The Future of the Multinational Enterprise.* New York: The Macmillan Press Ltd, 1976.

Budiono Kusumohamidjojo. *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.* Bandung: Binacipta, 1986.

Budiono Kusumohamidjojo. *Dasar-dasar Merancang Kontrak.* Jakarta : Grasindo, 1998.

Budiono Kusumohamidjojo. *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum.* Jakarta : Grasindo, 1999.

Budi Sudjijono dan Dody Rudianto. *Perspektif Pembangunan Indonesia. Dalam kajian Pemulihan ekonomi.* Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003.

Burght, Gr.van der and H.Th. M. Burgens. (ed). *Corporate Law In Practice.* Kluwer, 1988.

Burkley, Peter J. and Mark Casson. *The Future of The Multinational Enterprise.* London: The Macmillan Press Ltd, 1976.

Buxbaum, Ricard M. *The American Journal of Comparative Law. Volume. 48. Number 4, 2000.*

Campbell, Dennis. *Legal Aspects of Doing Business In Asia And The Pacific Vol 3.* Kluwer : Nederlands, 1985.

Campbell, D and A.Wolff. *Legal Aspects of Business Transactions And Investment In The Far East.* Kluwer : Nederlands, 1988.

Campbell, D and Reinhard Prokosch. *International Business Transaction.*

Kluwer : Nederlands, 1988

Centre For Strategic And International Studies (CSIS). *Batam Sebagai*

Ujung Tombak (Rangkuman Diskusi di CSIS dengan Kata

Pengantar oleh Hadi Susastro). Jakarta, 2003.

C.F.G. Sunaryati. Hartono. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam*

Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Bandung: Bina

tjipta, 1972.

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Masalah-masalah Dalam Joint Venture antara*

Modal Asing dan Modal Indonesia. Bandung: Alumni, 1974.

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*

Jakarta/Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman RI –Binacipta, 1982.

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional.*

Bandung: Alumni, 1991.

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir*

Abad Ke 20. Bandung : Alumni, 1994.

Chairul Anwar. *Hukum Perdagangan Internasional.* Jakarta: Novindo

Pustaka Mandiri, 1999.

Charles Himawan. *The Foreign Investment Process In Indonesia.* Jakarta :

Gunung Agung, 1980.

Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja. *Survey of Indonesian*

Economic Law. Business Law. Contracts and Business

Associations. Bandung: FH Unpad, 1984.

- Charles Himawan.** *Hukum Sebagai Panglima.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Chatamarrasjid Ais.** *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum YARSI).* Jakarta, 2003
- Clark, Rodney.** *The Japanese Company.* Yale University, 1979.
- Cushman, Robert F. Esq and Herbert A. More, C.P.A (ed).** *A Guide for The Foreign Investor. Doing Business in the U.S.A.* Dow Jones-Irwin, 1984.
- Cyberconsult.** *Reformasi Hukum di Indonesia. Hasil Studi Perkembangan Hukum (Proyek Bank Dunia). Cetakan Keempat.* Jakarta, 2000.
- Dahnial Khumarga.** *Regulasi Investasi, Kendala Dan Faktor Penunjangnya.* Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Bidang Pengantar Tata Hukum Indonesia Fakultas Hukum UPH Tangerang, 2 Maret 2002.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta.** *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Cetakan Kedua* Jakarta: Gramedia, 1999.
- Dar, Usha & Prata K.Dar.** *Investment Opportunities in Asean Countries.* New Delhi, India, 1979.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.** *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat.* Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

**Departemen Pertambangan dan Energi RI Direktorat Jendral
Pertambangan Umum.** *Himpunan Peraturan Perundang-
undangan Di Bidang Pertambangan Umum.*

Desai, Nishith M. *Nonresidents Incentives & tax Planing with special
reference to tax havens.* New Delhi, India, 1983.

Dibyو Prabowo dan Sonia Wadoyo. *AFTA Suatu Pengantar.* Yogyakarta:
BPFE, 2004.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI.
*Manfaat Dan Peluang Pembentukan Asean Investment
Area (AIA) Dalam Menarik Investor Asing Ke Indonesia.*
Jakarta, 2003.

Dirgo Sabariyanto. *Mengapa Disebut Bentuk Baku Dan Tidak Baku? Jilid 1
dan 2 (Kosakata). Cetakan Kelima.* Yogyakarta: Mitra
Gama Widya, 2001.

Dody Rudianto. *Pembangunan Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis Di
Indonesia.* Jakarta: Golden Trayon Press, 2002.

Dopfer, Kurt (dkk). *Economics In The Future (Ilmu Ekonomi Di Masa
Depan. Menuju Paradigma Baru).* Penerjemah: **Gunawan
Mohammad.** Jakarta:LP3ES, 1989.

Downes, John Jor and Elliot Goodman. *Kamus Istilah Keuangan &
Investasi.* Jakarta : Elex Media Komputendo, 1994.

Dunning, John H (ed). *The Multinational Enterprise.* London:George
&Unwin Ltd, 1971.

- E.K.M. Manisanambow** (ed). *Hukum dan Kemajemukan Budaya. Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke 70 Prof.Dr.T.O.Ihromi*. Jakarta: Obor, 2003.
- Emil Salim**. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Cetakan Keempat. Jakarta : Inti Idayu Press, 1984.
- Erman Rajagukguk**. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Erman Rajagukguk dkk** (ed). *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta : UI, 1995.
- E.Suherman (dkk)**. *Kumpulan Tulisan Untuk Mengenang Teuku Mohammad Radhie*. Jakarta: UPT Penerbitan Untar, 1993.
- Faisal Tamin**. *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Jakarta: Blantika, 2004.
- Fandy Tjiptono dan Totok Budi Santoso**. *Strategy Riset Lewat Internet*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Felix O.Soebagjo dan Erman Rajagukguk** (ed). *Seri Dasar-Dasar Hukum Hukum Ekonomi 2 (Arbitrase Di Indonesia)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Fortman, W.F. de Gaay**. *Het geheim van het rect (Rahasia Hukum)* diterjemahkan oleh **O. Notohamidjojo** Jakarta: BPK, 1973.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)**. *Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid 1 Edisi Ke 3. Jakarta :2001.

- Freddy Roeroe.** *BATAM Komitmen Setengah Hati.* Jakarta : Aksara Kurnia, 2003.
- Friedrich, Carl Joachim.** *The Philosophy of Law In Historical Perspective (Filsafat Hukum : Perspektif Historis).* Penerjemah : **Raisul Muttaqien.** Bandung : Nuansa dan Nuansamedia, 2004.
- Friedman, Lawrence M.** *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar).* Penerjemah: **Wishnu Basuki.** Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Fuad Hassan.** *Studium Generale.* Pustaka Jaya, 2001
- Giersch, Herbert.** *Politik Ekonomi.* Jakarta: Kedutaan Besar Jerman dan Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1968.
- Gijssels, Jan and Mark van Hoecke.** *Apakah Teori Hukum Itu?* Penerjemah : **Bachtiar Ibrahim,** Malang. 2000.
- Giddens, Anthony.** *The Third Way (Jalan Ketiga. Pembaruan Demokrasi Sosial) Cetakan Ketiga.* Alih bahasa: **Ketut Arya Mahardika.** Jakarta: Gramedia, 2002..
- Gilpin, Robert and Jean Milles Gilpin.** *“Tantangan Kapitalisme Global (The Challenge of Global Capitalism).* Penerjemah **Haris Munadar, Dudy Priatna.** Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gofar Bain.** *Uruguay Round Dan Sistem Perdagangan Masa Depan.* Jakarta:Djambatan, 2001.

- Gregorius Chandra (dkk).** *Pemasaran Global: Internasionalisasi Dan Internetisasi.* Yogyakarta, 2004
- Gunarto Suhardi.** *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi.* Yogyakarta :Unika Atmajaya, 2002.
- Gunarto Suhardi.** *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional.* Yogyakarta: Unika Atmajaya, 2004.
- Gupta, K.R.** *GATT And Under Develoved Countries.* Delhi: Harbans Lal Gupta, 1976.
- Hall, Hill.** *Foreign Investment and Industrialization.(Investasi asing dan Industrialisasi di Indonesia)* Penerjemah **Burhanuddin Abdullah.** Jakarta:LP3ES, 1990.
- Hemmer, Hans-Rimbert (et al).** *Negara berkembang dalam Proses globalisasi Untung atau buntung ?* Jakarta: Konrad Adenauer Stifftung, 2002.
- Henricus W.Ismanthono.** *Kamus Istilah Ekonomi Populer.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Heri Muliono.** *Merajut Batam Masa Depan Menyongsong Status Free Trade Zone.* Jakarta: LP3ES, 2001.
- Heru Nugroho.** *Negara, Pasar Dan Keadilan Sosial.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Hettne, Bjorn.** *Development Theory and The Three Worlds (Teori Pembangunan dan Tiga Dunia).* Alih bahasa :Tim Redaksi Gramedia. Editor : **A.Puspo Kuntjoro,** Jakarta : Gramedia, 2001.

- Hg. Suseno Tryanto Widodo.** *Ekonomi Indonesia fakta Dan Tantangan Era Liberalisasi.* Yogyakarta, 1996
- H. Gofar Bain.** *Uruguay Round Dan Sistem Perdagangan Masa Depan.* Jakarta: Djambatan, 2001.
- H. Kumala Hadi dkk (ed).** *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi Dan Politik di Indonesia.* Yogyakarta: PPM FE UII dan Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Hikmahanto Juwana.** *Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional (Bunga Rampai).* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Hirts, Paul and Grahame Thompson.** *Globalisasi Adalah Mitos (Globalization in Question).* Kata pengantar oleh **Didik J Rahcbini.** Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- HMN. Purwosutjipto.** *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8. Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran.* Jakarta: Djambatan, 1989.
- HMT. Oppusunggu.** *Sumber Krisis Moneter Indonesia.* Jakarta: KPG, 1998.
- Hooft, H. Ph. Visser't.** *Filosofie van de Rechtswetenschap (Filsafat Ilmu Hukum).* Penerjemah **B.Arief Sidharta.** Bandung: Laboratorium FH Unpar, 2002.
- Horn, Paul V and Henry Gomes.** *International Trade. 4th Edition.* New Jersey: Englewood Cliffs, 1964.
- H.S. Kartadjoemena.** *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round.* Jakarta: UI Pres, 1997.

- Huala Adolf dan A.Chadrawulan.** *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional.* Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Huala Adolf.** *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO).* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huijbers, Theo.** *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah.* Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Huijbers, Theo.** *Filsafat Hukum.* Cetakan Kesembilan.Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hulman Panjaitan.** *Hukum Penanaman Modal.* Jakarta : Indhill Co, 2003.
- Humas Pemda TK.I Jabar.** *Jawabarat Setelah 50 Tahun Kemerdekaan RI.* Bandung, 1995.
- H. Siagian.** *Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita Dan Realita.* Bandung: Alumni, 1978.
- Husband, William H and James C.Dockeray.** *Modern Corporation Finance.* Homewood, Illinois: Richard D.Irwin, Inc, 1966.
- Ida Bagus Wyasa Putra.** *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalm Transaksi Bisnis Internasional.* Bandung: Refika, 1997.
- Ida Susanti dan Bayu Seto (ed).** *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas. Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas.* (Percikan Gagasan Tentang Hukum V Fakultas Hukum Unpar). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Ifdhal Kasih dkk (ed).** *70 Tahun Soetandyo Wignyosoebroto. Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya).* Jakarta : Elsam-HiMa, 2002.
- I G Rai. Widjaja.** *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas.* Jakarta : Pradnya Paramita, 1994.
- I G Rai Widjaja.** *Penanaman Modal. Pedoman Prosedur Mendirikan dan menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- I Made Widnyana (dkk).** *Bunga rampai Pembangunan Hukum di Indonesia. Kumpulan Karya Ilmiah Para Pakar Hukum.* Bandung: Eresco, 1995.
- Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal.** *Membangun Good Corporate Governance (GCG)* Jakarta: Harvarindo, 2002.
- Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal.** *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal Di Indonesia.* Jakarta: Harvarindo, 1999.
- Industrial Development Organization (UNIDO).** *Pedoman Perundingan Joint-venture Di Negara-negara Berkembang.* Penerjemah: **R. Harun Alrasjid Wirasapitra.** Bandung: Karya Nusantara, (tanpa tahun).
- International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID).** *Investment Laws of the World. Volume I-X.* Oceana Publications, Inc. Dobbes Ferry, NY. 2004.

- I Nyoman Tjager (dkk).** *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia.* Jakarta: Prehallindo, 2003.
- I.P.M. Ranuhandoko.** *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia).* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Irawan Soejitno.** *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.* Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Ismail Suny dan Rudiono Rochmat.** *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri.* Jakarta : Pradnya Paramita, 1972
- I.S. Susanto dan Bernard. L Tanya (ed).** *Wajah Hukum Di Era Reformasi. Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, S.H.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Iver, R.M Mac.** *Negara Modern (Penerjemah Moertono).* Jakarta : Aksara Baru, 1980.
- Jasso Winarto (ed).** *Pasar Modal Indonesia. Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- John J.O Ihalauw.** *Penggunaan Modal Asing.* Jakarta: BPK Gunung Agung, 1972.
- Jones, Gareth R; Jennifer M George; Charles W L. Hill.** *Contemporary Management. Second Edition.* Irwin McGraw-Hill, 2000.
- J. Panglaykim–Pangestu.** *Investasi Langsung Jepang Di Kawasan ASEAN. Pengalaman Indonesia.* Yogyakarta: Andi Offset. 1984.

- J.Panglaykim.** *Bisnis Internasional: Indonesia, ASEAN dan Dunia.* Jakarta: CSIS, 1983.
- J.Panglaykim.** *Perusahaan Multinasional dalam Bisnis Internasional.* Jakarta: CSIS, 1980.
- Kartiyoso Sayogyo.** *Migas dan Usaha Migas Kumpulan Pokok-Pokok Pikiran.* Jakarta: 1999.
- Kasto, Jalil.** *International Law of Technology.* London, 1992.
- Kean, Neoh Soon.** *Stock Market Investment in Malaysia and Singapore.* Kuala Lumpur: Berita Publishing SDN, BHD, 1989.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag.** *VOC di Kepulauan Indonesia berdagang dan menjajah.* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Keith, Lyman A and Carlo E. Gubellini.** *Introduction To Business Enterprise. 4th edition.* McGraw Hill, 1975.
- Kelsen, Hans.** *General Theory of Law and State. (Teori Hukum Murni. Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif)* Penerjemah: **Soemardi,** Jakarta: Remidipress, 1995.
- Khudzaifah Dimyati.** *Teorisasi Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Cetakan Kedua.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

- Khudzaifah Dimiyati (ed).** *Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Kirdi Dipoyudo.** *Membangun Atas Dasar Pancasila.* Jakarta: CSIS, 1990.
- Kirdi Dipoyudo.** *Seri Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila 1. Keadilan Sosial.* Jakarta: Rajawali, 1985.
- Kolvenbach, Walter.** *Protection of Foreign Investments. A Private Law Study of Safeguarding Devices in International Crisis Situations.* Kluwer, 1989.
- Kompas Media Nusantara.** *Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 1.* Jakarta: 2001.
- K.R.Gupta.** *GATT and Under Developed Countries.* Delhi: Atma Ram and Sons, 1976.
- Krishna D Danumurti Dan Umbu Rauta.** *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kuin, Peter.** (Penyunting) dengan Kata Pengantar **Sjahrir.** *Perusahaan Transnasional.* Jakarta: Gramedia–Obor, 1987.
- Kuntjoro Purbopranoto.** *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara.* Bandung: Alumni, 1975.
- K. Wantijk Saleh.** *Kitab Himpunan Lengkap Ketetapan MPRS/MPR .* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.

- Leong, Tan Cheng and Terenc T.S.Lim.** *Indonesia Business and Investment Opportunities.* Singapore: Cassia Communications Pte. Ltd, 1992.
- Lili Rasjidi.** *Dasar-dasar Filsafat Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Lili Rasjidi dan I B Wyasa Putra.** *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi.** *Pengantar Filsafat Hukum. Edisi Ketiga.* Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Loekman Soetrisno dan Faraz Umayo (ed).** *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan.* Yogyakarta: P3PK dan Tiara Wacana Yogya, 1995.
- Lucky W. Sondakh.** *Globalisasi & Desentralisasi. Perspektif Ekonomi Lokal (Penyunting: Abdi W. Buchari)* Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2003.
- Lund, Philip J.** *Investment The Study of an Economic Aggregate.* North Holland Publishing, 1971.
- Mahadi.** *Falsafah Hukum Suatu Pengantar.* Bandung : Alumni, 1989.
- M. Arif Nasution.** *Demokrasi & Problema Otonomi Daerah.* Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Mallor, Jane P. (et.al)** *Business Law and the Regulatory Environment. Concepts and Cases.* Mc.Graw Hill, 1998.
- Mann, Richard I (Ed).** *Dutch Investment in Indonesia a New Era.* Canada: Gateway Books, 1994.

- Mardiasmo.** *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi, 2002.
- Marjanne Termorshuizen.** *Kamus Hukum Belanda Indonesia.* Jakarta:Djambatan, 1999.
- Marian Darus Badruzaman.** *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya (Kumpulan Karangan).* Bandung: Alumni, 1981.
- Martias gelar Iman Radjo Mulano.** *Pembahasan Hukum. Pendjelasan-Pendjelasan Istilah Hukum Belanda – Indonesia untuk studie dan Praktiek.* Medan:PD Sumatera Utara, 1969.
- Melda Kamil Ariadno (ed).** *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan)* oleh **D.Sidik Suraputra..** Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI, 2004.
- Mestika Zed.** *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- M. Dawan Rahardjo.** *Wawasan Dan Visi Pembangunan Abad 21.* Jakarta: Intermedia, 1997.
- Mhd. Shiddiq Tgk. Armia.** *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Mieke Komar,dkk (ed).** *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik & Negarawan. Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja.* Bandung : Alumni, 1999.

- Ministry of Investment/The Investment Coordinating Board (BKPM).**
Investment in Indonesia. Jakarta, 1994.
- Myrdal, Gunnar.** *Economic Theory and Underdeveloped Regions.*
London:Butler & Tanner, Ltd, 1972.
- Myrdal, Gunnar.** *Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations.* Vol
III. London : Allen Lane The Penguin Press, 1968.
- M. Irsan Nasarurdin dan Indra Surya.** *Aspek Hukum Pasar Modal
Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Misahardi Wilamarta.** *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka
Good Corporate Governance.* Jakarta: Program
Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2002.
- Mochtar Kusmaatmadja.** *Pengantar Hukum Internasional. Buku I Bagian
Umum.* Bandung: Binacipta, 1976.
- Mochtar Lubis.** *Trasformasi Budaya Untuk Masa Depan.* Jakarta :Gunung
Agung, 1988.
- Moh Nazir.** *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Moh. Mahfud M.D.** *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi.* Yogyakarta:
Gama Media. 1999.
- M. Solly Lubis.** *Sistem Nasional.* Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Mountjoy, Alan B.** *Industrialization and Developing Countries
(Industrialisasi dan Negara-negara Dunia Ketiga).* Alih
Bahasa, **DH Gulo.** Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- M. Tatang Amirin.** *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: Rajawali, 1986.

- Muchtar Affandi.** *Ilmu-Ilmu Kenegaraan. Suatu Studi Perbandingan.*
Bandung: Lembaga Penerbitan Fisip Unpad, 1982.
- Muladi.** *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia.* Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Munir Fuady.** *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari WTO)*
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nagarajan, K.L. (et.al).** *Principles of Commerce and General Commercial Knowledge.* Ram Nagar, New Delhi: S.Chand & Company, Ltd, 1977.
- Nonet, Philippe and Philp Selznick.** *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law (Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi).* Penerjemah: **Rafael Edy Bosco.** Jakarta: Humanika, 2004.
- Normin. S Pakpahan.** *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang PT.*
Jakarta : ELIPS, 1995.
- Normin. S Pakpahan dan Peter Mahmud.** *Pemikiran Ke arah Pembaharuan Undang-undang Penanaman Modal Indonesia.* Jakarta: Elips, 1997.
- Ohmae, Keichi.** *Dunia Tanpa Batas. (The Boarderless World).* Alih Bahasa oleh **F.X.Budiyanto.** Jakarta: Binarupa Aksara, 1991.
- Oliver, M.C.** *Cases in Company Law.* Estover, Plymouth: Macdonald and Evans ltd, 1976.
- O. Notohamidjojo.** *Makna Negara Hukum.* Jakarta : BPK, 1970.

- O. Notohamidjojo.** *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum.* Jakarta : BPK, 1975
- Oentoeng Soerapati.** *Hukum Investasi Asing.* Salatiga : Fakultas Hukum UKSW, Salatiga., 1987.
- Osborne, David and Ted Gaebler.** *Reinventing Government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector (Mewirusahaakan Birokrasi. Mentrasformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik).* Cetakan Kelima. Penerjemah: **Abdul Rosyid.** Jakarta:Pustaka Binaman Pressindo, 1999.
- Osborne, David and Peter Plastrik.** *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government (Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha).* Penerjemah: **Abdul Rosyid dan Ramelan.** Jakarta:Penerbit PPM, 2000.
- Otje Salman dan Eddy Damian(ed).** *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.* Bandung: Alumni, 2002.
- Otje Salman.** *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum.* Bandung: Alumni, 1989.
- Otto, J.M.** *Reele rechtszekerheid in ontwikkelingslanden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het vakgebied van recht en bestuur in ontwikkelingslanden aan de Universiteit Leiden op vrijdag 16 juni 2000*
- Padmo Wahjono.** *Negara Republik Indonesia.* Jakarta: Rajawali, 1982.

- Pandji Anoraga.** *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing.*
Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Panitchpakdi, Supachai and Mark L. Clifford.** *China and The WTO. Changing China, Changing World Trade.* Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2002.
- Paulus Effendi Lotulung** (ed). *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Pieter Kuin** (ed). *Perusahaan Transnasional.* Jakarta: Gramedia, 1987.
- Podgorecki, Adam and Crhistopher J. Whelan.** *Sosiological Approaches to Law (Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum)*
Penerjemah: **Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra.**
Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Pointer, J.A.** *Rechtsvinding (Penemuan Hukum).* Penerjemah: **B. Arief Sidharta.** Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unpar, 2001.
- Pound, Roscoe.** *An Introduction To the Philosophy Of Law. Second Edition.*
Yale University Press, 1961.
- Pound, Roscoe.** *Pengantar Filsafat Hukum.* Alih Bahasa oleh **Muhammad Radjab.** Jakarta: Bharata, 1972.
- Pound, Roscoe.** *Tugas Hukum (The Task of Law).* Alih Bahasa oleh **Muhammad Radjab.** Jakarta: Bharata, 1965

- Reyes, Zenaida S (ed).** *Investment Incentive Laws Of ASEAN Countries.*
University of The Philippines, Law center. Quezon City.
1987.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto.** *Indonesia 2020. Sebuah Sketsa Tentang Visi dan Strategi dalam Kepemimpinan Manajemen Politik dan Ekonomi.* Jakarta: RBI, 1998.
- Ridwan. HR.** *Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: UII Pres, 2002.
- Rizal Mallarangeng.** *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992.* Cetakan Kedua. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2004.
- Roestanto W. Dirdjojuwono.** *Kawasan Industri Indonesia Sebuah Konsep Perencanaan Dan Aplikasinya.* Bogor: KPP IPB, 2004.
- Rony Hanityo Soemitro.** *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat.* Bandung: Alumni, 1980.
- Rony Hanityo Soemitro.** *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Cetakan keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990..
- Roo, A.J.de and R.W. Jagtenberg (ed).** *Yearbook Law & Legal Practice In East Asia.* Volume. I, 1995.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio.** *Kamus Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.
- R. Subekti.** *Arbitrase Perdagangan Internasional.* Bandung : Binacipta, 1979.
- R. Subekti.** *Kumpulan Karangan, Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan.* Bandung: Alumni, 1980.

- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio.** *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Rudhi Prasetya.** *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rusdin.** *Bisnis Internasional Dalam Pendekatan Praktek. Jilid 1 dan 2.*
Bandung: Alfabeta, 2002.
- Sadu Wasistiono.** *Esensi UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai).* Jatinangor: Alqaprint , 2001.
- Santikarn, Mingsarn.** *Technology Transfer.* Singopre University Press, 1981.
- Saleh Adiwinata (dkk).** *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae. Belanda Indonesia.* Bandung: Binacipta, 1983.
- Satjipto Rahardjo.** *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan.* Bandung : Alumni, 1978.
- Satjipto Rahardjo.** *Hukum Dan Masyarakat.* Bandung: Angkasa, 1980.
- Satjipto Rahardjo.** *Hukum Dan Perubahan Sosial.* Bandung: Alumni, 1983.
- Satjipto Rahardjo.** *Sosiologi Hukum. Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah.* (Penyunting: **Khudzaifah Dimiyati**). Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Scholten, Paul.** *De Structuur Der Rechtwetenschap (Struktur Ilmu Hukum)*
alih bahasa oleh **B. Arief Sidharta.** Bandung: Alumni, 2003.
- Sedarmayanti.** *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi*

Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju, 2003.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua. Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)* Bandung : Mandar Maju, 2004.

S.F. Marbun, dkk (Penyunting.) *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara.* Cetakan Kedua Yogyakarta: UII Pres, 2002

Shibata, Hirofumi and Toshihiro (eds). *The Welfare State Public Investment and Growth. Selected Papers from the 53rd congress of the International Institute of Public finance.*

S.H.Sarundajang. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalannya.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Sjahran Basah. *Tiga Tulisan Tentang Hukum.* Bandung: Armico, 1986.

Soediman Kartohadiprodo. *Hukum Nasional Beberapa Catatan.* Bandung: Binacipta, 1980.

Soedjatmoko. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Pilihan Karangan.* Jakarta: LP3ES, 1995.

Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia.* Bandung: Mandar Maju, 1997.

- Soedjono Dirdjosisworo.** *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia.* Bandung : Mandar Maju, 1999.
- Soedjono Dirdjosisworo.** *Filsafat Hukum. Penghayatan Makna Lewat Analisis Konsep Dan Telaah Terhadap Beberapa Perspektif.* Bandung: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unpar, 2001.
- Soemitro Djojohadikusumo.** *Perdagangan Dan Industri Dalam Pembangunan.* Jakarta : LP3ES, 1985.
- Soemitro Djojohadikusumo.** *Trilogi Pembangunan Dan Ekonomi Pancasila.* Jakarta: IKPN-RI, 1985.
- Soerjono Soekanto.** *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia. Cetakan Keempat.* Jakarta: UI Pres, 1974.
- Soerjono Soekanto.** *Penegakan Hukum.* Bandung: Binacipta, 1983.
- Soerjono Soekanto.** *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Pres, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.** *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Ketiga.* Jakarta: Rajawali, 1990.
- Sondang P. Siagian.** *Filsafat Administrasi Pembangunan.* Jakarta: Gunung Agung. 1980.
- Sondang P. Siagian.** *Administrasi Pembangunan. Cetakan Kesebelas.* Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Sornarajah, M.** *The International Law on Foreign Investment.* NY: Cambrige University Press, 1994.

- S. Reyes, Zenaida (ed).** *Investment Incentive Laws of ASEAN Countries.*
Qoezon City, U.P Law Center, 1978.
- Sritua Arief dan Adi Sasono.** *Modal Asing Beban Hutang Luar Negeri Dan
Ekonomi Indonesia.* Jakarta: UI Press, 1987.
- Sudargo Gautama.** *Pengertian Tentang Negara Hukum.* Bandung : Alumni,
1973.
- Sudargo Gautama.** *Indonesia dan Arbitrase Internasional.* Bandung :
Alumni, 1986.
- Sudargo Gautama.** *Arbitrase Dagang Internasional.* Bandung: Alumni,
1986.
- Sudargo Gautama.** *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Di
Indonesia.* Bandung: Eresco, 1989.
- Sudargo Gautama.** *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional.* Bandung :
Alumni, 1991.
- Sudargo Gautama.** *Aneka Perkara Indonesia Di Luar Negeri.* Bandung:
Alumni, 1999.
- Sudargo Gautama.** *Indonesian Business Law.* Bandung: Citra Adytia Bakti,
2000.
- Sudargo Gautama.** *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum
Indonesia.* Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004.
- Sudikno Mertokusumo.** *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Cetakan
Kedua. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sukarna.** *Sistim Politik. Cetakan Ketiga.* Bandung: Alumni, 1981.

- Sumantoro.** *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang Dan Implikasi di Indonesia.* Bandung:Alumni, 1983.
- Sumantoro.** *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing.* Bandung: Alumni, 1984.
- Sumantoro.** *Kegiatan Perusahaan Multinasional. Problema Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional* Jakarta : Gramedia, 1987.
- Sumantoro.** *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal (Problems of Investment in Equities and in Securities)* Bandung: Binacipta, 1991.
- Sumantoro.** *Masalah Pengaturan Alih Teknologi.* Bandung: Alumni, 1993.
- Suwarsono dan Alvin Y. So.** *Perubahan Sosial Dan Pembangunan.* Jakarta: LP3ES, 2000.
- Syaukani HR.** *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik.* Jakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2003.
- Syaukani HR.** *Welcome Investor Di Era Otonomi Daerah.* Jakarta: Nuansa Mandani Publisher, 2003.
- Taryana Soenandar.** *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyllesaian Sengketa Bisnis Internasional.* Jakarta :Sinar Grafika, 2004.
- Tatang M Amin.** *Pokok-Pokok Teori Sistem. Cetakan Ketujuh* Jakarta: Rajawali, 2001.

- Teuku Mohammad Isa.** *Kiat Sukses Pengusaha Minyak Amerika.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Thee Kian Wie.** *Industrialisasi Di Indonesia Berbagai Kajian.* Cetakan Kedua. Jakarta : LP3ES, 1996.
- The Liang Gie.** *Teori-Teori Keadilan.* Yogyakarta: Super, 1979.
- Thoby Mutis.** *Cakrawala Demokrasi Ekonomi.* Jakarta :LP-Kukmus – Usakti, 2002.
- Tim Pakar Hukum DepKeh dan HAM RI.** *Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia. Catatan dan Gagasan Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra.* Jakarta: Sekretariat Jendral DepKeh dan Ham RI, Jakarta: 2002.
- Tim Pakar Hukum DepKeh dan HAM RI.** *Gagasan Dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional.* Jakarta: 2002.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar.** *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: FH Unpar, 1995.
- T. Mulya Lubis.** *Hukum dan Ekonomi.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1980.
- T. Mulya Lubis dan Rchard M.Buxbaum.** (Penyunting). *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Tinbergen, Jan.** *Rencana Pembangunan. Cetakan Kedua.* Jakarta: UI Press, 1978.
- Tineke Louise Tuegeh Longdong.** *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958.* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.

- Tony Budidjaja.** *Public Policy As Grounds For Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia.*
Jakarta: Tatanusa, 2002.
- Trebilcock, Michael J. and Robert Howse.** *The Regulation International Trade.* Second Edition. London: Routledge, 1999.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).**
Globalization And Liberalization: Effects of International Economic Relations on Poverty. Geneva, 1996.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).**
International Investment Instruments: A Compendium.
Volume VI. United Nations New York and Geneva, 2001.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).**
World Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives.
United Nations New York and Geneva, 2003.
- United Nations.** *Transnational Corporations. Volume 7 Number 1 April 1998.*
- Vago, Steven.** *Law and Society.* Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1981.
- Vago, Steven.** *Social Change.* New Jersey: Prentice Hall Inc, 1980.
- Vasey, Lloyd R. (Ed)** *ASEAN (Association of South East Asian Nations) and a Positive Strategy for Foreign Investment.* Report and Papers of a Private conference. Organized by The Pacific forum, 1978.

- Wallace, Don. Jr and Robert B. Shanks. Annotations By David A. Levy.**
Model Foreign Investment Law With Annotations.
Kluwer, 1996.
- W.F.Prins-R.Kosim Adisaputra.** *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara.* Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.
- W. Head, John.** *Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Seri Dasar Hukum Ekonomi 1. Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris.* Jakarta : ELIPS, 1997.
- Winardi.** *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia). Cetakan Kedelapan*
Bandung: Alumni, 1982.
- Winardi.** *Ilmu Ekonomi Aspek Sejarahnya.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Winarno Yudho dkk.** *Sosok Guru Ilmuan Yang Kritis dan Konsisten. Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof.Soetandyo Wignyosoebroto.* Jakarta: Elsam, Huma dan Walhi, 2002.
- World Bank.** *Global Economic Prospects and The Developing Countries.* Washington, DC, 2003.
- Yanto Bashri (ed).** *Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia. Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Y.B. Mangunwijaya (ed).** *Teknologi Dan Dampak Kebudayaannya Vol I.* Cetakan Ketiga. Jakarta: Obor, 1993.

Agus Brotosusilo. *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO).* Makalah dalam seminar tentang “Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis atas Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Penyelenggara Program Pascasarjana UI, Jakarta 6 September 1995.

Alfons Samosir. *Catatan Ringkas Mengenai GATT 1994 Dan WTO.* Makalah disampaikan dalam kuliah umum “globalisasi perdagangan, regionalisasi perdagangan dan dampaknya terhadap Indonesia”. Bandung: FH Unpar, 12 Mei 2001.

Andrey Sujatmoko. *Sinkronisasi “Das Sollen dan “Das Sein” (Tinjauan Terhadap Konseptualisasi Hukum).* Dalam Kumpulan Tulisan Untuk Mengenang **R.Pratikto Sastrohadikoesoemo.** Jakarta: FH Trisakti, 1999.

Ari Kokko. *Globalization and FDI Incentives.* Dalam: www.unctad.or *investment law.* Diakses, tanggal 4 Juni 2004.

Armida S.Alisjahbana. *Kesiapan Indonesia Menghadapi AFTA dan Integrasi Ekonomi ASEAN: Tinjauan Aspek ekonomi.* Makalah dalam seminar “Aspek-aspek ekonomi dan Hukum Implikasi AFTA 2003. Bandung: FH Unpad, 2003.

Arumugam Rajenthiran. *Indonesia: An Overview of the Legal Framework for Foreign Direct Investment.* Dalam www.yahoo.com/investment law. Diakses tanggal 20/10/04.

Bacelius Ruru. *Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang dan Masa Mendatang.*” Dalam www.nccg-indonesia.com/lokarya/yogya. diakses tanggal 23/3/04

Bagir Manan. “Good Governance: Hindarkan rakyat dari tindakan Negara yang merugikan”. Dalam *Jurnal Masyarakat Transparansi Indonesia*, edisi 14/15 Th. 1999.

Bagir Manan. *Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum untuk masa depan Indonesia.* Dalam www.hukumonline.com. Diakses, tanggal 10 Juli 2004.

Bagir Manan. *Pembangunan Dan Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional Dalam Globalisasi.* Makalah dalam seminar tentang Pendekatan Ekonomi Dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam rangka Globalisasi. Bandung: FH Unpad, 1998.

Benny Pasaribu. *Kebijakan Investasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi.* Makalah dalam seminar “Sinergi BKPM & BUMN Dalam Rangka Menggerakkan Perekonomian Indonesia Di Masa Depan”. Jakarta: Sucofindo, 2002.

Bismar Nasution. *“Implikasi AFTA terhadap kegiatan investasi dan Hukum investasi Indonesia”*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 22. Edisi Januari-Februari 2003.

Charles McClain and Hang-Sheng Cheng. *China’s Foreign Trade And Foreign Investment Law*. Dalam <http://www.1990isntitute.org/publications/pubs/ISUPAP11.html>. Diakses tanggal 9 Juni 2003

David M.Trubek. *Teori Hukum Max Weber Dan Bangkitnya kapitalisme*. Dalam Jurnal Keadilan Volume 1 No.5, 2001.

D. A. Simarmata. *“Hajat Hidup Orang Banyak dan PP 20/1994”*. Artikel dalam Harian Suara Pembaharuan, edisi 22 Juni 1994.

Daoed Joesoef. *Ideologi Pembangunan*. Artikel dalam Harian Umum Kompas, edisi 27 September 2004.

Deddy Mulyadi, artikel dalam Harian Umum Pikiran Rakyat *”Profesionalisme Aparatur di Era Otda*. Edisi, 2 September 2004.

Deddy Mulyadi artikel dalam Harian umum Pikiran Rakyat *“Birokrasi Yang Melayani, bukan Dilayani”*. Edisi, 15 Mei 2004.

Didi Irawadi Syamsuddin. *Globalisasi Hukum*. Dalam Jurnal Keadilan Volume 1, No.4 .2001.

Djisman S. Simanjuntak dan Mari E Pangestu. GATT 1994 *PELUANG DAN TANTANGAN*. Dokumen dan Analisis. Kumpulan Makalah Seminar *“Benang Merah GATT: Peluang dan*

Tantangan Bisnis” Jakarta :Sekolah Tinggi Manajemen
Prasetya Mulya, : 14-15 Juni 1994

Djisman S. Simanjuntak. *Ekonomi Pasar Sosial Terbuka Indonesia: Landasan Stabilitas Dalam Ekonomi Global Yang Berubah Dramatik.* Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni dan Fakultas Ekonomi Unpar, Bandung 4 Desember 2004.

D.Sidik Suraputra. “*ICSID DAN MIGA; Lembaga Internasional Untuk Meningkatkan arus Penanaman Modal*”. Dalam: Jurnal Hukum Bisnis Volume 8, Jakarta 1999.

Diah Soewito. *Peluang Usaha Perusahaan Asing di Indonesia.* Makalah disampaikan dalam Penataran Hukum Ekonomi. Jakarta, 1995.

Direct Investment Dalam : <http://www.iseas.edu.sg/pub.html>. Hal. 7, diakses tanggal 29 Maret 2004.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal, BPKM. “*Kebijakan Pengembangan Investasi*”. Makalah dalam Seminar Nasional “Tinjauan Hukum dan Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah”. Penyelenggara Laboratorium Hukum Keperdataan FH Ubaya-Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur. Surabaya, 27 Mei 2004.

Doli D Siregar, artikel dalam Harian Umum Media Indonesia, “*Daerah Berlomba Menjemput Investor*”. Jakarta, edisi 14 September 2004.

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Perlunya Pengaturan Kembali Berbagai Peraturan Perundang-undangan Tentang Penanaman Modal di Indonesia.* Makalah dalam Panel Diskusi “Peranan Hukum Penanaman Modal Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Untuk Menyongsong Otonomi Daerah /dan Era Perdagangan Bebas”. Bandung : STHB, 2000.

Erman Rajagukguk. “Perlunya Pembaruan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Pasar Modal Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan "Good Corporate Governance" Sumber: [<http://www.nccg-indonesia.org/lokakarya/yogyabruru.html>]. diakses tanggal 24/3/04].

Faisal H Basri. *Liberalisasi Perdagangan Yang Mencilakakankah?* Artikel dalam Harian Umum Kompas, edisi 6 Desember 2004.

Gary F. Bell. *The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws.* Dalam ”Asian-Pacific Law & Policy Journal.” Volume 2, Issue 1 Winter 2001.

Hatanto Reksodipoetro. *Kebijakan Pemerintah Di bidang Industri dan Perdagangan Serta Kesiapan Daerah Dalam Menyongsong Era Pasar Bebas ASEAN.* Makalah pada seminar :”Tantangan Dan Peluang Profesi Advokat/Penasehat Hukum Dalam Menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) Dan Undang-undang Otonomi

Daerah No. 22 Tahun 1999. Penyelenggara: KB-ALDAMA
Dan ADA LAW FIRM. Jakarta, Agustus 2000.

Hidayatullah Suralaga. *Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanaman Modal Dalam rangka Otonomi Daerah.* Makalah dalam Panel Diskusi “Peranan Hukum Penanaman Modal Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Untuk Menyongsong Otonomi Daerah /dan Era Perdagangan Bebas”. Bandung : STHB, 2000.

H.Teguh Samudra. *Pelimpahan Wewenang Pusat Kepada Daerah di bidang PMA Untuk Mendukung Otonomi Daerah.* Makalah dalam Panel Diskusi “Peranan Hukum Penanaman Modal Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Untuk Menyongsong Otonomi Daerah /dan Era Perdagangan Bebas”. Bandung : STHB, 2000.

H.Hata. *Perjanjian Trim's Serta Akibat Hukumnya, Khususnya Bagi Indonesia.* Makalah dalam Panel Diskusi “Peranan Hukum Penanaman Modal Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Untuk Menyongsong Otonomi Daerah /dan Era Perdagangan Bebas”. Bandung : STHB, 2000.

Hikmahanto Juwana. *The Legal Infrastructure For Trade And Investment In Indonesia.* Paper presented at International Law Conference hold by Asia-Europe Institute, University of
357

Malaya on 3 and 4 September 2001 at Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam: www.yohoo.foreigndirectinvestmentlaw.com. Diakses tanggal, 4 April 2004.

Hikmahanto Juwana. *Prospek Investasi Asing di Daerah dalam Menyongsong Berlakunya Undang-undang Investasi Baru.* Makalah dalam Seminar nasional “Prospek Investasi di Daerah dalam Menyongsong Berlakunya Undang-undang Investasi Baru”. Jakarta: FH Trisakti-Elips II, 2002.

Holly J. Gregory & Marsha E. Simms. *Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa Dan Mengapa Hal Tersebut Penting.* Sumber: [<http://www.nccg-indonesia.org/lokakarya/yogyabruru.html>.] diakses tanggal 24/3/04].

Huala Adolf. *Aspek-aspek Hukum Implikasi AFTA.* Makalah dalam seminar “Aspek-aspek ekonomi dan Hukum Implikasi AFTA 2003. Bandung: FH Unpad, 2003.

James D Wolfensohn. “*Memangkas Birokrasi demi Pertumbuhan Ekonomi*”. Artikel dalam Harian Umum Kompas, edisi, 22 September 2004.

Joe C. Bartlett. “*Good governance and investment*”. Artikel dalam *The Jakarta Post*, 2004

Johan S.Sjahperi. *Perubahan Lingkungan Ekonomi Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Sumber Daya Manusia Indonesia*

di bidang Hukum Ekonomi Internasional. Orasio dies natalis FH Unpar Bandung, 1998.

John D.Sullivan. *Corporate Governance: Transparansi antara pemerintah dan bisnis.* Dalam Jurnal Reformasi ekonomi vol.1. No.2. 2000.

Karen Mills. *“Major Concerns of Investors to and in Indonesia”* Makalah dalam Seminar Prospek Investasi di Daerah Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Investasi yang Baru. Penyelenggara Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta 22 July, 2002.

Kepala BAPPBPP Propinsi Jawa Timur. *“Kesiapan Daerah Dalam Investasi Di Era Otonomi Daerah”.* Makalah dalam Seminar Nasional “Tinjauan Hukum dan Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah”. Penyelenggara Laboratorium Hukum Keperdataan FH Ubaya-Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur. Surabaya, 27 Mei 2004.

Komar Kantaatmadja. *“Komentar atas Hukum Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Beberapa Pemikiran Untuk Pembaharuan Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia”.* Dalam *Padjadajaran, Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat.* Jilid XXIII. No.1 -1996.

- Kustigar Nadeak**, artikel dalam Harian Umum Sinar Harapan “*Otonomi Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi*” Jakarta, 29 April 2004.
- Kwik Kian Gie**. “*PP 20/1994 bertentangan dengan UU No. 1/1967, UU No. 6/1968, UU No. 21/1982 dan jiwa UUD 1945*”. Artikel dalam Harian Umum Kompas, edisi 7 Juni 1994.
- Lawrence M. Friedman**. *Sistem Hukum Amerika; Unsur, Fungsi, Dan masa depan Common Law*. Dalam Jurnal Keadilan Volume 2 No.1 Tahun 2002.
- Leong, Tan Cheng and Terence T.S. Lim**. *Indonesia Business and Investment Opportunities*. Singapore: Cassia Communication Pte Ltd, 1992.
- Leo Agustino**. *Good Regulatory Governance Sebagai Wujud Akuntabilitas Publik*. Dalam Jurnal Administra Publik (JAP) Nomor 2 Volume 2003. Fisip Unpar Bandung Oktober 2003.
- L. Michael Hager**. *Peranan Hukum Di Masa Transisi Demokrasi Negara Berkembang*. Artikel dalam Jurnal Keadilan Vol.1.No.2.Juli 2001.
- Mann, Richard I (ed)**. *Dutch Investment in Indonesia : A New Era*. Ontario, Canada: Gateway Books, 1994.
- Mas Achmad Santosa**..*Meluruskan Jalan Reformasi (Perspektif Good Governance) Agenda Pembaharuan hukum Nasional dalam rangka mewujudkan Good Governance*.(makalah)

Disampaikan dalam Seminar Nasional, Meluruskan Jalan Reformasi. Yogyakarta, UGM, 25-27 September 2003.

M.Nadjib. *“Kebijakan Investasi Dalam Menyongsong UU PM Baru dan Pelaksanaan Otonomi Daerah”* Makalah disampaikan pada ; Seminar Nasional Tentang Prospek Investasi Di Daerah Menyongsong Berlakunya UU PM yang baru. Jakarta: 22 Juli 2002

Mochtar Kusumaatmadja. *“Pengembangan Filsafat Hukum Nasional”.*

Dalam Majalah Hukum Pro Justitia, FH Unpar Bandung, No. 1 Tahun XV. Januari 1997

Mochtar Kusumaatmadja. *Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay.* (Bandung Unpad, 2000 makalah)

Mochtar Kusumaatmadja. *Hububungan antara Hukum dan Masyarakat.*

Kertas kerja Simposium Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Kenyataan-kenyataan Masyarakat. Jakarta : Penyelenggara BPHN, 26-28 1976

Mustopadidjaja. AR. *Penyelenggaraan Negara Abad 21* (Makalah)

Disampaikan dalam Seminar Nasional, Meluruskan Jalan Reformasi. Yogyakarta, UGM, 25-27 September 2003.

Dalam: [\[http://www.ugm.ac.id/seminar/reformasi/i-1Mustopadidjaja.php\]](http://www.ugm.ac.id/seminar/reformasi/i-1Mustopadidjaja.php) diakses tanggal 4/4/04

M.Sadli dan Bambang Setiaji. *Menciptakan Iklim Investasi Kondusif di Daerah.* Makalah dalam Seminar Sehari, Surakarta, 22 Pebruari 2003.

Muladi. *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan, Dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi.* Dalam Jurnal Keadilan Volume 1. No. 4. 2001.

Normins S.Pakpahan. *Pengaruh Perjanjian WTO Pada Pembentukan Hukum Ekonomi Internasional.* Dalam Jurnal Hukum

Norman Brown IV. *The Long Road to Reform: An Analysis of Foreign Investment Reform in Vietnam.*

Dalam:

http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/lwsch/journals/bciclr/25

[_1/03-TXT.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/lwsch/journals/bciclr/25). diakses, tanggal 7 januari 2005bisnis,

Volume 3, 1998.

Nguyen Nhu Binh dan Jonathan Haughton. *Trade Liberalization and Foreign Direct Investment in Vietnam.* Dalam

<http://www.jonathan.haughton@suffolk.edu>. diakses,

tanggal 20 Juni 2004.

Natasya Yunita S. *Teori Sistem Hukum Dari Austin.* Dalam Majalah Hukum Trisakti, edisi khusus, Juli 2001.

Nurjaman Arsjad. *Perdagangan Bebas dan Kesiapan Indonesia.* Jurnal Analisa, 1999.

P.Agung Pambudhi. *Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Permasalahan Dan Refleksinya Dalam Pembangunan*

ekonomi. Makalah pada tanggal 31 Agustus 1991 disampaikan di hadapan Sivitas Akademi Universitas Atmajaya Jakarta.

Robert D.Cooter. “The Rule of State Law and The Rule-of-Law State:Economic Analysis of the Legal Foundations of Development”. Dalam *Annual World Bank Conference on Development Economics*. Edited by **Michae Bruno and Boris Pleskovic**, Washington DC, 1996.

Ryaas Rasyid dan Djohermansyah Djohan. “Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Era Otonomi Daerah” *Sumber*
[<http://infosia.ut.ac.id/Jurnal/71ryass.htm>.] diakses tanggal 3/4/04

Sandra Berkun. *Foreign Direct Investment in China*. Dalam:
<http://internationalecon.com/currentissues/china/berkun.pdf>, Investment in China. Diakses, tanggal 10 Desember 2004.

SMERU Field Report. *Regional Autonomy and The Business Climate: Three Kabupaten Case Studies from West Java*. June, 2002.

Sigit P. Pramudito. *Kebijakan Pemerintah Dalam Hal Pemberian Insentif & Kemudahan Pajak Serta Pengaturan Bidang Perpajakan*. Makalah dalam Seminar nasional “Prospek Investasi di

Daerah dalam Menyongsong Berlakunya Undang-undang Investasi Baru”. Jakarta: FH Trisakti-Elips II, 2002.

Taryana Sunandar (dkk). *Laporan akhir Penelitian tentang Aspek Hukum Perdagangan Dikaitkan Dengan Penanaman Modal*. Jakarta: BPHN, 1995/1996

Taryana Sunandar. *Perdagangan Bebas Dan Harmonisasi Hukum: Kajian Atas doktrin “Lex Mercatoria”*. Dalam Jurnal Keadilan, Volume 1, No.5. 2001.

Thee Kian Wie. “*Yang Lebih Penting Daripada PP 20/1994*”. Artikel dalam Majalah Tempo, edisi 18 Juni 1994.

T. Mulya Lubis. “*Deregulasi Langkah Besar*”. Artikel dalam Majalah Tempo, edisi 18 Juni 1994.

Tim Fakultas Hukum Universitas Surabaya. “*Problematika Hukum Kaitannya dengan Investasi di Era Otonomi Daerah*”. Makalah dalam Seminar Nasional “Tinjauan Hukum dan Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah”. Penyelenggara Laboratorium Hukum Keperdataan FH Ubaya-Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur. Surabaya, 27 Mei 2004.

T.Sitorus. *Penanaman Modal dan Investasi*. Bandung: Tarsito, 1999.

Tulus Tambunan. *Daya Saing Indonesia untuk Menarik PMA semakin buruk?*. Artikel dalam “Media Indonesia” Edisi, Sabtu 14 September 2002.

- The American Journal of Comparative Law.** Volume 48. Number 4, 2000.
- United Nations.** *Trasnational Corporations.* Volume 7, Number 1, April 1998.
- United Nations.** *Patterns And Impact of Foreign Investment in The Escap Region. Economic and Sosial Commission for Asia and The Pacific. Bangkok, Thailand, 1985*
- Watanabe, Takeo.** *Recent Indonesia Investment Climate: Persepective and expectations (Japanese Investors' experiences).* Makalah dalam seminar “Sinegi BKPM & BUMN Dalam Rangka Menggerakkan Perekonomian Indonesia Di Masa Depan”. Jakarta: Sucofindo, 2002.
- Zudan Arif Fakrulloh.** *Membangun Citra Hukum Melalui Putusan hakim Yang Berkualitas.* Dalam Jurnal Keadilan, Volume1. No.3. 2001.
- Zudan Arif Fakrulloh.** *Paradigma Dan Jatidiri Hukum Nasional Dalam Struktur Global Hukum Dunia.* Artikel dalam “Jurnal Keadilan, Volume2. No.6. 2002.
- Analisa** CSIS, Tahun XIV N0.1 Januari 1985 “*Masasalah Ekonomi yang Rumit dan Pemecahannya*”?
- Analisis** CSIS, Tahun XXIX/2000. N0.1 “*Otonomi Daerah Penyelesaian atau Masalah*”?
- Analisis** CSIS, Tahun XXX/2001 N0.4 ‘*Tragedi WTC : Implikasinya bagi Ekonomi Indonesia*”

Informasi Penanaman modal Di Indonesia Dan Fasilitas Pajak, Kepabeanan Serta Fasilitas lainnya Berdasarkan Otonomi Daerah yang diterbitkan oleh Kerukunan Pensiunan Dep.Keu, Ri. Jakarta, 2002.

Netherlands International Law Review (NILR). Vol XXVII 1980.

Jurnal **Hukum Bisnis** : Volume 1 tahun 1997; Volume 2 Tahun 1977; Volume 1 April 1998; Volume 8, Tahun 1999; Volume 19 Tahun 2002; Volume 22. No. 5-Tahun 2003; Volume 22 . Januari-Februari 2003

Jurnal **Keadilan.** Volume.1 No. 2. Tahun 2001; Volume.2 No. 6. Tahun 2002; Volume 3. No. 3. Tahun 2003/2004.

Padjadajaran. Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat. Jilid XXIII. No.1 -1996.

Pro Justitia. Majalah Hukum Triwulan. FH Unpar Bandung. Tahun XII. Nomor 1. Januari 1994; Tahun XIII. Nomor 2. April 1995; Tahun XIII. Nomor 3. Juli 1995; Tahun XIV. Nomor 2. April 1996; Tahun XV. Nomor 1. Januari 1997; Tahun XV. Nomor 2. April 1997; Tahun XVI. Nomor 1. Januari 1998; Tahun XVII. Nomor 4. Oktober 1999; Tahun 20. Nomor 1. Januari 2002.

Jurnal Administrasi Publik.(JAP) Fisip Unpar, Nomor 2.Volume 2003

Wacana. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. Edisi 5 Tahun II 2000

Jurnal **Dialektika.** Volume 3 No.1 2003.

Harian Umum **Kompas,** edisi 17 April 2004 ; Edisi 19 April 200 ; edisi 6 Agustus 2004 ;Edisi 8 September 2004. edisi 14 Agustus 2003

Harian Umum **Media Indonesia,** edisi, 14 September 2002.; edisi 28 Agustus 2002;

Harian Umum **Bisnis Indonesia**, Edisi, 3 Agustus 2004; Edisi 16 April 2004;
Edisi 30 April 2004 Edisi 7 Oktober 2004;

Harian Umum **Suara Pembaruan** edisi 27 Oktober 2004; edisi Januari 04

Harian Umum **Pikiran Rakyat.**, edisi Mei, September 2004.

WHAT IS GOOD GOVERNANCE? Sumber : what GG :

[\[http://www.mail-archive.com/rantau-net@groups.or.id/msg02342.html\]](http://www.mail-archive.com/rantau-net@groups.or.id/msg02342.html)

diakses 6/4/04

C. Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan MPR 2000, Bandung : Pustaka, 2001.

Undang-undang Dasar 1945 beserta dengan amandemennya, diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal MPR.

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1970 Tentang
Penanaman Modal Asing.

Undang-undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan Atas Konvensi
Tentang Penyelesaian Perselisihan Antar Negara Dan
Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Undang-undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan UU No.12 tahun 1970 Tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang. No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

Undang-Undang. No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang/Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000.

Undang-Undang. No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang . No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang N0.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan
Menjadi Undang-undang.

Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintahan Dan Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme

Undang-undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan
Nasional

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham dalam
Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA, LN RI
Tahun 1994 No. 28

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan
Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan,
Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan
Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan
Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau
Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero)
Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya
Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri
Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha
Milik Negara

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi

Peraturan Pemerintah No.107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah

Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1986 Tentang Pengesahan *Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency.*

Keputusan Presiden RI No. 96 Tahun 1998 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup Bagi Penanaman Modal .

Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan

Keputusan Presiden RI No. 183 Tahun 1998 Tentang **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

Keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 2000 Tentang Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing

Keputusan Presiden RI No.118 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden RI No. 96 Tahun 1998 Tentang
Daftar Bidang Usaha Tertutup Bagi Penanaman Modal .

Keputusan Presiden RI No. 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2001 Tentang Tim Konsultasi
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2003 Tentang Tim Nasional
Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi

Keputusan Presiden RINo. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun
1981 Tentang BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL Sebagaimana Telah
Beberapakali Diubah Terakhir Dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 120 Tahun 1999.

Keputusan Presiden RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal
asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui
Pelayanan satu Atap.

Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi
Menjelang dan Sesudah berakhirnya program kerjasama
dengan International Monetary Fund.

Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal No. 15/SK/1994 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA,
Jakarta 1994

Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No. 30/SK/1998 Tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan Yang Didirikan Dalam rangka
PMA/PMDN.

Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No. 38/SK/1999 Tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan Yang Didirikan Dalam rangka
PMA/PMDN

Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan
Usaha Milik Negara No. KEP-23 /M-PM.PBUMN/2000
Tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate
Governance* Dalam Perusahaan Perseroan
(PERSEROAN).

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 57/SK/2004
Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka
373

Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal
Asing

Rancangan Undang-undang Tentang Penanaman Modal (2001).

Http: www.kppod.or

Http: www.worldbank.or

Http: www.unctad.or

Http: www.bkpm.go.id

Http: www.yahoo.com. Investment law.

Http: www.asean.or.